

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA PERKAWINAN
STATELESS PERSON YANG MELANGSUNGKAN PERKAWINAN
DENGAN WARGA NEGARA INDONESIA APABILA TERJADI
DEPORTASI**



**OLEH :
HANS SAMUEL LISTIJONO
NIM.031914253016**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2022**

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA PERKAWINAN
STATELESS PERSON YANG MELANGSUNGKAN PERKAWINAN
DENGAN WARGA NEGARA INDONESIA APABILA TERJADI
DEPORTASI**

T E S I S

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



OLEH :

**HANS SAMUEL LISTIJONO, S.H.
NIM. 031914253016**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui,

Tanggal, Januari 2022

Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I:


PROF. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H.

NIP. 198308102006042001

DOSEN PEMBIMBING II:



Dr. INDIRA RETNO ARYATI, S.H., M.H.,

NIP. 198003202005012002

Mengetahui :

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Dr. INDIRA RETNO ARYATI, S.H., M.H.,

NIP. 198003202005012002

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,

Pada tanggal 12 Januari 2022

PANITIA PENGUJI TESIS :

Ketua : Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.

Anggota : 1. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.

2. Dr. Indira Retno Aryati, S.H., M.H..

3. Erni Agustin, S.H., LL.M.

4. Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

❖ Nama : HANS SAMUEL LISTIJONO
❖ NIM : 031914253016
❖ Alamat/No. Tlp. : Dharmahusadaoemas A-103/081335000464

dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatas namakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari hasil karya orang lain. Tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan;
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Tesis ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma pengaturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 20 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan,



NIM. 031914253016

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa, Tesis yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA PERKAWINAN *STATELESS PERSON* YANG MELANGSUNGKAN PERKAWINAN DENGAN WARGA NEGARA INDONESIA APABILA TERJADI DEPORTASI” ini dapat tersusun dengan baik atas bantuan dari berbagai pihak khususnya kepada orang tua penulis yang senantiasa memberikan dukungan secara moril, doa dan kasih sayang kepada penulis. Begitu banyak manfaat yang penulis dapatkan selama pengerjaan tesis ini, dengan segala kesabaran dan kepercayaan bahwa penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan, sebagaimana yang telah tertuang dalam tesis ini.

Dalam kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan, serta dukungan guna terwujudnya penulisan tesis ini. Maka pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Ibu Dr. Indira Retno Aryantie, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Airlangga.
3. Prof. Agus Yudha Hernoko selaku Pembimbing dan Anggota Penguji Tesis.

4. Dr. Indira Retno Aryati, S.H., M.H., selaku Pembimbing dan Anggota Penguji Tesis.
5. Para Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta para Staff pada Program Studi Magister Kenotariatan, yang memberikan kepada saya kesempatan untuk belajar dan menyelesaikan tesis serta menyelesaikan masa studi.
6. Kepada kedua orang tua penulis, yaitu Bapak dan Ibu atas segala doa, dukungan dan didikan yang selalu diberikan kepada penulis.
7. Segenap sahabat terdekat penulis, yang telah mau menemani penulis, disaat penulis merasa ingin menyerah tetapi tetap berada di sisi penulis dan terus memberikan semangat tiada henti.
8. Kepada rekan-rekan, kolega, staff dan siapa saja yang secara langsung maupun tidak langsung ikut mendukung dan memberikan doa restunya selama kuliah sampai selesainya tesis ini.

Semoga semua amal budi baiknya mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam tesis ini, sehingga dengan segala kerendahan hati penulis masih mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari rekan-rekan pembaca.

Surabaya, 19 Januari 2022

Penulis,



HANS SAMUEL LISTIJONO

ABSTRAK

Hubungan perkawinan antara seorang WNI dengan *stateless person* nyatanya banyak terjadi di Indonesia yang dimana perkawinan tersebut tidak dapat dilarang karena tidak ada peraturan yang melarang perkawinan keduanya. Permasalahan akan muncul apabila *stateless person* yang telah melangsungkan perkawinan dengan seorang WNI harus di deportasi ke luar wilayah Negara Indonesia yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan mengenai akibat dari pendeportasian tersebut yang salah satunya ialah harta perkawinan. Permasalahan hukum yang dapat diangkat dalam penelitian tesis ini adalah : (a) perkawinan antara WNI dengan *stateless person* mempunyai akibat hukum terhadap harta perkawinan pasangan tersebut dan (b) upaya penyelesaian terhadap harta perkawinan apabila pasangan *stateless person* di deportasi dari wilayah negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *doctrinal research* dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta mengacu kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pemerintah Indonesia harus memberikan solusi apabila terjadi perkawinan antara WNI dan *Stateless Person*, solusi tersebut dapat berupa Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Dirjen Keimigrasian, atau bahkan Instruksi Presiden. Melihat dari contoh putusan diatas bahwa *stateless person* selalu dirugikan atas kepemilikan aset selama perkawinan dan mempertimbangkan kedudukan anak-anak mereka yang menjadi ahli waris, maka majelis hakim apabila ada permohonan *isbat nikah* harus memperhatikan pula hak-hak anak-anak mereka selaku ahli waris. Jangan sampai perkawinan kedua orang tuanya yang tidak dicatatkan karena tidak memiliki kewarganegaraan, akan menimbulkan kerugian materiil bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan WNI dan *stateless person*.

Kata Kunci : Perkawinan, *Stateless Person*, Deportasi, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Marriage between a citizen of Indonesia (WNI) and a stateless person is in fact a common thing occurs in Indonesia, where the marriage is permissible due to inexistence of regulations about the matter. Problems will emerge if the stateless person married to an Indonesian citizen, must be deported outside the territory of Republic of Indonesia which causes injustice regarding the consequences of the deportation, one of which is marital property. The legal issues that can be raised in this thesis are: (a) marriage between an Indonesian citizen and a stateless person has legal consequences for the spouse's marital property and (b) efforts to settle the marital property if the stateless person spouse is deported from Indonesia. This study used a doctrinal research method with a status approach, a conceptual approach, and refers to primary legal materials and secondary legal materials. Indonesian government are obliged to provide a solution if marriage between an Indonesian citizen and a stateless person occurs. The solution can be in the form of Government Regulation, or Regulation of the General Director of Immigration, or even Presidential Instruction. Observing from the example of the decision above, stateless persons are always aggrieved by ownership of assets during marriage and considering the position of their children or heirs. Therefore, the panel of judges must also pay attention to the rights of the children as heirs if there is request filed for *isbat nikah*. Material disadvantages to the children who are born from the unregistered marriage between Indonesian citizens and stateless persons must be prevented at any cost.

Keywords: marriage, stateless person, deportation, legal protection.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 5216).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Undang-Undang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Konvenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050).

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768).

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENETAPAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I	PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	18
1.3 Tujuan Penelitian.....	19
1.4 Manfaat Penelitian.....	19
1.5 Metode Penelitian	19
1.5.1 Tipe Penelitian.....	19
1.5.2 Pendekatan Masalah	20
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	21
1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	22
1.5.5 Analisis Bahan Hukum.....	22
1.6 Sistematika Penulisan.....	23

BAB II	KEDUDUKAN HUKUM PERKAWINAN ANTARA PASANGAN WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN STATELESS PERSON	
2.1	Keabsahan Perkawinan Antara WNI Dengan <i>Stateless Person</i>	25
2.2	Pengaturan Harta Perkawinan Antara WNI Dengan <i>Stateless Person</i>	44
BAB III	UPAYA HUKUM DALAM PENYELESAIAN TERHADAP HARTA PERKAWINAN APABILA PASANGAN STATELESS PERSON DI DEPORTASI DARI WILAYAH NEGARA INDONESIA.....	
3.1	Penyebab Pendeportasian <i>Stateless Person</i>	54
3.2	Hak Dan Kewajiban <i>Stateless Person</i> Yang Melangsungkan Perkawinan Di Indonesia	57
3.3	Perlindungan Hukum Terhadap Harta Perkawinan <i>Stateless Person</i>	70
BAB IV	PENUTUP	
4.1	Kesimpulan.....	94
4.1	Saran.....	95
	DAFTAR BACAAN.....	